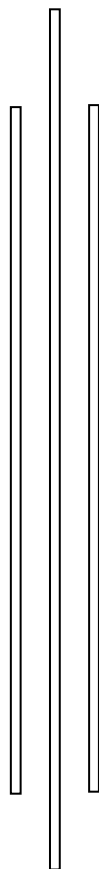




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

STATISTIK DAN PERSANDIAN

TAHUN ANGGARAN 2023

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LAPORAN KEUANGAN	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	2
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II.....	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	6
2. Hambatan dan Kendala.....	7
BAB III.....	8
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	8
1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja.....	8
a. Pendapatan	8
b. Belanja	8
2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	10
a. Aset.....	10
b. Kewajiban.....	22
c. Ekuitas	23
3. Penjelasan Laporan Operasional.....	23
4. Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	29
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	31
1. Penjelasan Umum.....	31
2. Informasi Lainnya.....	31
BAB V.....	32
PENUTUP.....	32

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 67

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian

HERMAN WIDODO, SH.

NIP. 19650916 199112 1 001.

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

Terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; *Laporan -SKPD-Pembukuan AkruaI-LRA*
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; *Laporan -SKPD-Pembukuan-LRA*
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan dengan pilihan program dan kegiatan dikosongkan (untuk laporan belanja langsung dan tidak langsung) per 31 Desember 2023; *Laporan- SKPD-Pembukuan-LRA per Periode* (program kegiatan kosong)
- 4) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan (per 31 Desember 2023). *Laporan- SKPD-Pembukuan-LRA per Periode* (program kegiatan diisi)

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

LAPORAN OPERASIONAL

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan tahun 2023 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2023 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 0. mencapai 0 % dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 12.565.230.828,11 atau mencapai 96,58% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2023 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.188.296.655,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 48.450.294,00., investasi jangka panjang sebesar Rp0, aset tetap sebesar Rp. 2.495.309.498,00, dana cadangan Rp0 dan aset lainnya sebesar Rp 644.536.863,00.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 90.343.100,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 90.343.100,00., dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.097.953.555,00

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp 0, Beban dari kegiatan Operasional Rp 13.371.234.426,11 dan surplus/defisit sebesar Rp (13.371.234.426,11)

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp 4.379.436.178,00, Surplus/Defisit Rp (13.371.234.426,11) dan Ekuitas akhir sebesar Rp 3.097.953.555,00

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- t. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 1/C);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 6/B);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017,

- tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/C);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Blitar Nomor 17;
 - hh. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 9/A);
 - ii. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/B);
 - jj. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 5/E);
 - kk. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/A) ;
 - ll. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 7/E);
 - mm. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 34/E);
 - nn. Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 61/A);

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar Rp 13.010.545.101,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan (sesuai di Laporan Simda)	0,00
2.	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	12.626.182.893,00
3.	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	384.362.208,00
	Surplus/(Defisit)	13.010.545.101,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp 13.010.545.101,00 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp 13.010.545.101,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar selama tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
	- <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja	0,00	0,00	0,00
	- <i>Belanja Operasi</i>	12.626.182.893,00	12.199.221.228,11	96,62
	- <i>Belanja Modal</i>	384.362.208,00	366.009.600,00	95,23
	Total Belanja	(13.010.545.101,00)	(12.565.230.828,11)	96,58

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja Daerah
- Realisasi belanja sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp 12.565.230.828,11 atau 96,58 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp 445.314.272,89 atau 3,42 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.481.069	72.864.000	95,27
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.048.126.101	2.846.677.612	93,39

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	168.450.000	165.822.801	98,44
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	381.335.922	379.768.313	99,59
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290.325.590	275.577.701	94,92
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.160.920	193.403.827	99,10
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.476.449	141.941.955	99,62
8	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.697.511.334	2.551.303.657	94,58
9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.100.258.000	4.098.812.159	99,96
10	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	861.500.100	827.805.052	96,09
11	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	870.424.016	844.956.273,11	97,07
12	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125.957.600	114.543.878	90,94
	Total	13.010.545.101	12.565.230.828,11	96,58

2. Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Rasionalisasi anggaran untuk keperluan Pemilu 2024;
- e. SDM yang sangat kurang kompeten;
- f. Kuantitas SDM yang sangat kurang;

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Anggaran dan Realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022, adalah NIHIL.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b. Belanja	12.565.230.828,11	15.184.496.927,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2023 sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1) Belanja Operasi	12.199.221.228,11	13.160.305.724

Belanja Operasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp 12.199.221.228,11 dengan rincian sebagai berikut.

No .	Belanja Operasi		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2023	2022
(a)	Belanja Pegawai		3.118.866.101	2.916.287.612	2.597.654.503
	1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.898.196.450	1.802.683.614	1.588.856.943
	-	Belanja Gaji Pokok ASN	1.348.052.190	1.284.013.400	1.097.819.900
	-	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	138.144.490	130.975.322	125.426.282
	-	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.224.500	145.650.000	155.190.000
	-	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.228.000	15.120.000	17.814.000
	-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.862.500	30.940.000	16.390.000
	-	Belanja Tunjangan Beras ASN	85.025.120	81.182.820	74.882.280

No	Belanja Operasi		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2023	2022
	-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.774.360	10.622.884	10.083.435
	-	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.420	19.226	15.587
	-	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	101.142.410	93.589.623	82.183.946
	-	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.780.880	2.642.598	2.262.867
	-	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	8.342.580	7.927.741	6.842.000
	-	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.599.000	0,00	0,00
	2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.149.929.651	1.043.993.998	911.805.060
	-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	882.708.034	837.288.834	864.475.140
	-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	267.221.617	206.705.164	47.329.920
	3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.740.000	69.610.000	96.992.500
	-	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	65.940.000	64.810.000	94.592.500
	-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000	4.800.000,00	2.400.000
(b)		Belanja Barang dan Jasa	9.507.316.792	9.282.933.616,11	10.562.651.221
	1	Belanja Barang	727.012.470	705.870.633	550.336.750
	-	Belanja Barang Pakai Habis	727.012.470	705.870.633	550.336.750
	-	Belanja Barang Tak Pakai Habis	0,00	0,00	0,00
	-	Belanja Barang Bekas Pakai	0,00	0,00	0,00
	2	Belanja Jasa	7.528.831.956	7.337.796.618,11	8.780.393.786
	-	Belanja Jasa Kantor	6.094.301.284	5.922.041.118,11	6.723.052.786
	-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	199.980.000	198.000.000	198.000.000
	-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	300.000
	-	Belanja Jasa Konsultasi non Konstruksi	0,00	0,00	119.800.000
	-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.234.550.672	1.217.755.500	1.739.161.000
	3	Belanja Pemeliharaan	447.961.000	447.543.5460	450.708.900
	-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat kerja	0,00	0,00	38.650.000
	-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	447.961.000	447.543.546	412.058.900
	4	Belanja Perjalanan Dinas	803.511.366	791.722.819	781.211.785
	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	803.511.366	791.722.819	781.211.785

No .	Belanja Operasi		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2023	2022
	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Jumlah			12.626.182.893	12.199.221.228,11	13.160.305.724

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2) Belanja Modal	366.009.600,00	1.585.415.700,00

Belanja Modal Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2023 Rp 366.009.600 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Belanja Modal		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	
				2023	2022
1		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.336.000	26.085.000	233.325.000
	-	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.412.000	10.765.000	148.948.000
	-	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.924.000	15.320.000	
	-	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	84.377.000
2		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	149.775.837	147.800.000	47.965.000
	-	Belanja Modal Alat Studio	145.625.782	143.650.000	47.965.000
	-	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.150.055	4.150.000	
3		Belanja Modal Komputer	179.770.371	178.094.600	1.220.875.700
	-	Belanja Modal Komputer Unit	154.479.875	152.915.600	907.190.000
	-	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.290.496	25.179.000	313.685.700
4		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	14.480.000	14.030.000	
5		Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	83.250.000
	-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	83.250.000
Jumlah			384.362.208	366.009.600	1.585.415.700

2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Aset	3.188.296.655,00	4.449.666.505,00

Saldo Aset Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.188.296.655,00 dengan rincian sebagai berikut.

N o	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(1)	Aset Lancar	48.450.294,00	7.008.100

(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	2.495.309.498,00	3.798.121.542
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	644.536.863,00	644.536.863
Jumlah Aset		3.188.296.655,00	4.449.666.505

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1) Aset Lancar		
	48.450.294,00	7.008.100,00
Saldo Aset Lancar Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023 sebesar 48.450.294,00, dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	Persediaan	48.450.294,00	7.008.100,00
Jumlah		48.450.294,00	7.008.100,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a) Kas	0,00	0,00
Saldo Kas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023 sebesar NIHIL		

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b) Piutang Retribusi	0,00	0,00
Saldo Piutang Retribusi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar NIHIL		

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
c) Piutang lain-lain	0,00	0,00
Saldo piutang lain-lain Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar NIHIL :		

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
d) Persediaan	48.450.294,00	7.008.100,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar Rp 48.450.294, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	12.707.692
2	Kertas Dan Cover	15.625.260
3	Bahan Cetak	1.987.500
4	Bahan Komputer	6.684.400
5	Perabot Kantor	2.241.180
6	Alat Listrik	9.024.262
	JUMLAH	48.450.294

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023 sebesar NIHIL

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
3) Aset Tetap	0,00	0,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.451.782.665,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.798.121.542,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	Tanah	0,00	0,00
(b)	Peralatan dan Mesin	10.581.583.589,00	10.597.473.724,30
(c)	Gedung dan Bangunan	473.152.967,00	473.152.967,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	644.536.863.00	644.536.863,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(8.602.953.891,00)	(7.272.505.149,30)
Jumlah Aset		3.144.769.822,00	4.449.666.505,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp (15.890.135,30) diperoleh dari jumlah total aset tahun 2023 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2022 (Rp 11.715.163.554,30 -Rp 11.699.273.419,0) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a) Peralatan dan Mesin	10.581.583.589,00	10.597.473.724,30
Saldo peralatan dan mesin Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023 sebesar Rp 10.581.583.589,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada (<i>lampiran mutasi aset tetap 2023</i>)		
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		10.597.473.724,30
Penambahan Peralatan dan Mesin		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal	391.530.200,00	
Hibah		
Mutasi	532.685.000,00	
Reklasifikasi	9.500.000,00	
Koreksi		+
Jumlah penambahan		933.715.200,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(900.554.735,30)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(49.050.600,00)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(949.605.335,30) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023

10.581.583.589

Koreksi tambah aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 933.715.200 dengan rincian sebagai berikut:

- Komputer dan Peralatan Komupter	217.645.200,00	
- Peralatan Perlengkapan Kantor	26.420.000,00	
- Peralatan Pendingin	9.165.000	
- Peralatan Studio Audio Video	147.800.000,00	
- Kendaraan Roda 4	532.685.000,00	+
Total Koreksi Tambah		933.715.200,00

Koreksi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 949.605.335,30 dengan rincian sebagai berikut:

- Kendaraan bermotor perorangan	(242.735.735,30)	
- Personal Komputer Laptop	(657.819.000,00)	
- Reklas belanja modal	(49.050.600,00)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(949.605.335,30)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
b) Gedung dan Bangunan	473.152.967	473.152.967,00

Saldo gedung dan bangunan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023 sebesar Rp 473.152.967,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2023

473.152.967,00

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi		+
Jumlah penambahan		
Pengurangan Gedung dan Bangunan		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		473.152.967,00

Koreksi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
c) Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023 sebesar NIHIL .

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
d) Aset Tetap Lainnya	644.536.863	644.536.863

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023 sebesar Rp 644.536.863 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2023

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+

Jumlah penambahan		
Pengurangan Aset Tetap Lainnya		
Penghapusan	(.....)	)
Mutasi	(.....)	)
Hibah	(.....)	)
Reklasifikasi	(.....)	)
Koreksi	(.....	+)
Jumlah Pengurangan		
		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		

Koreksi tambah aset tetap Lainnya sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		
		

Koreksi kurang aset tetap Lainnya sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+

Total Koreksi Kurang

(.....)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
e) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
8.602.953.891,00	7.380.114.439,00

f) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.559.427.058,00. dengan rincian sebagai berikut:

NO	Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Peralatan Dan Mesin	(8.389.545.310,00)	(7.219.431.240,00)
2	Gedung dan Bangunan	(169.881.748,00)	(160.683.199,00)
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
	JUMLAH	(8.559.427.058,00)	(7.380.114.439,00)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal Per 1 Januari 20237.380.114.439,00.

Penambahan Akumulasi penyusutan

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan1.170.114.070,00
Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan9.198.549,00
Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Jalan,
Jaringan dan Irigasi +

1.179.312.619,00

Reklasifikasi.....

Koreksi..... +

Jumlah penambahan1.179.312.619,00

Pengurangan Akumulasi penyusutan

Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan	(.....)	+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	8.559.427.058,00	

Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang	(.....)	

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar NIHIL.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
5) Aset Lainnya	0,00	0,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	644.536.863	644.536.863
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Aset		644.536.863	644.536.863

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2023 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2022 (Rp0,00-Rp0,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a) Aset Tak Berwujud	644.536.863	644.536.863
Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp 644.536.863,00 merupakan Lisensi perangkat lunak dengan perincian sebagai berikut.		
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		
Penambahan Aset Tak Berwujud		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi		+
Jumlah penambahan		
Pengurangan Aset Tak Berwujud		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		

Koreksi tambah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-		
-		
-		
-		
-		+
Total Koreksi Tambah		

Koreksi kurang Aset Tidak Berwujud sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(.....)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
b) Aset Lain-lain	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar NIHIL dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Rincian saldo aset lain-lain sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	<i>Misal:</i> Meubelair		
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2023 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongkan

dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstrakomptabel)dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1	<i>Misal:</i> Meubelair		
2			
3			
<i>Jumlah</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b. Kewajiban	90.343.100,00	70.230.327

Saldo Kewajiban Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 90.343.100,00 dengan rincian sebagai berikut

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	90.343.100,00	70.230.327,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar.yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 90.343.100,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 70.230.327,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	TPP Beban Kerja PNS	68.791.155,00
(b)	TPP Kondisi Kerja PNS	18.052.821,00
(c)	Belanja Iuran Jamkes PNS	23.473.758,00
(d)	Belanja Telepon	25.366,00
Jumlah Hutang		90.343.100,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar *NIHIL*

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
--	--------------------------	--------------------------

c. Ekuitas	4.289.662.147,00	4.379.436.178,00
Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD sebesar Rp 4.289.662.147,00		

3. **Penjelasan Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2023 yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/ Defisit Operasional.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Pendapatan LO	0,00	0,00
Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar NIHIL.		
Terdapat selisih antara Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO yaitu sebesar Rp..... (Rp... - Rp...), perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:		
1) Piutang Murni (2023) sebesar NIHIL:		
2) Pendapatan Hibah – LO sebesar NIHIL:		
3) Koreksi Kurang Catat Pendapatan – LO sebesar NIHIL:		
4) Setoran Piutang tahun sebelumnya sebesar NIHIL :		
5) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar NIHIL:		
6) Koreksi Lebih Catat Pendapatan – LO sebesar NIHIL:		

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b. Beban	13.371.234.426,11	14.528.395.969,00
Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 13.371.234.426,11 lebih kecil Rp 1.157.161.542,89 atau 7,96% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 14.528.395.969,00,dengan rincian sebagai berikut.		
1) Beban Pegawai		
Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.936.400.884,00 lebih besar Rp 340.922.045,00 atau 13,13.% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 2.595.478.839,00 dengan rincian sebagai berikut.		

Tabel 3.1 Rincian Beban Pegawai - LO

No.	Rincian Beban Pegawai - LO	Saldo (Tahun 2023)	Saldo (Tahun 2022)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	1.803.457.200,00	1.588.773.264,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	1.063.433.684,00	909.713.075.00

3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.610.000,00	96.992.500,00
Jumlah Total		2.936.400.884,00	2.595.478.839,00

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp 2.936.400.884,00 Tidak sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp 2.916.287.612,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 20.113.272 Selisih tersebut merupakan selisih dari TPP bulan Desember 2022 yang di bayarkan pada Januari 2023 dengan TPP Desember 2023 yang dibayarkan di Januari 2024.

2) **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 9.289.915.851,11 lebih kecil Rp 1.274.278.287,89 atau 12,06% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 10.564.194.139 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2 Rincian Bebang Barjas - LO

No.	Rincian Beban Barang dan Jasa - LO	Saldo (Tahun 2023)	Saldo (Tahun 2022)
1.	Beban Barang	664.428.439,00	551.962.850,00
2.	Beban Jasa	7.351.826.119,11	8.780.310.604,00
3.	Beban Pemeliharaan	447.543.546,00	450.708.900,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	791.722.819,00	781.211.785,00
Jumlah Total		9.225.520.923,11	10.564.194.139,00

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

Total Nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 9.225.520.923,11 tidak sama dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar Rp 9.282.933.616,11 sehingga terdapat selisih sebesar Rp (27.412.693,00) (Rp 9.255.520.923,11- Rp 9.282.933.616,11). Hal ini dikarenakan timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan penurunan umur manfaat atau potensi jasa, dan lain-lain. Selisih sebesar Rp (27.412.693,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa –		Rp 9.282.933.616,11
LRA		
Penambahan		
1	Beban dari Persediaan Awal (1 Januari 2023) Barang dan Jasa	Rp 7.008.100,00
2	Utang Beban Barang Jasa	Rp 25.366,00
3	Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal	Rp. 14.030.000,00
4	Beban dibayar dimuka (beban sewa rumah jabatan/dinas)	Rp.

5	Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah	Rp.	
6	Koreksi Lebih Catat Utang Beban Barang dan Jasa	Rp. 0,00	
	Jumlah Penambahan		Rp 21.063.466,00
	Pengurangan		
7	Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2023) Barang dan Jasa	Rp(48.450.294,00)	
8	Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2023	Rp(25.865,00)	
9	Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa	Rp (0)	
10	Koreksi Kurang Catat Utang Beban Barang dan Jasa	Rp(0,00)	
	Jumlah Pengurangan		Rp(48.476.159,00)
	Beban Barang dan Jasa – LO		Rp (27.412.693)
	1. Beban dari Persediaan Awal sebesar Rp 7.008.100,00 berasal dari:		
	a Beban Bahan Pakai Habis	Rp	
	.		
	b Beban Persediaan Bahan/ Material	Rp	
	.		
	c Beban Cetak dan Penggandaan	Rp	
	.		
	d Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp	
	.		
	e Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Rp	
	.		
	f. Beban Barang Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	Rp	
	JUMLAH		Rp 7.008.100,00
	2. Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 25.865,00. merupakan kewajiban yang timbul pada bulan Desember 2022 dan masih harus dibayar pada bulan Januari 2023 yang nantinya akan berpengaruh pada Beban Jasa Kantor diantaranya:		
	Utang Beban Telepon	Rp 25.865,00	
	a. Utang Beban Air	Rp	
	b. Utang Beban Listrik	Rp	
	c. Utang Beban Surat Kabar/ Majalah	Rp	
	d.		

e.	Utang Beban Faximili, Internet	Rp
f.	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp
g	Utang Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp
JUMLAH		Rp 25.865,00

3. Sedangkan Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal sebesar Rp..... dapat dijelaskan sebagai berikut.

a	Beban Bahan Habis	Rp
.	Pakai	
-	Beban Persediaan	Rp
	Alat Tulis Kantor	
-	dst	Rp
b	Beban Persediaan	Rp
.	Bahan Material	
-	Beban Persediaan	Rp
	Bahan Baku	
	Bangunan	
-	dst	Rp
c	Dst	Rp
-	dst	Rp
JUMLAH		Rp

4. Beban Sewa Dibayar Dimuka NIHIL.

5. Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah sebesar NIHIL:

6. Koreksi kurang catat utang beban barang dan jasa sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

a	Utang Beban Telepon	
-	Data Utang Beban Telepon	Rp 0
	awal	
-	Pembayaran Utang Beban	Rp (0)
	Telepon	
	Kurang Catat Saldo Awal Beban	Rp 0,00
	Telepon	
b	Utang Beban Air	
-	Data Utang Beban Air Awal	Rp
-	Pembayaran Utang Beban	Rp (.....)
	Air	
	Kurang Catat Saldo Awal Beban	Rp
	Air	
JUMLAH		Rp 0,00

7. Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2023) Barang dan Jasa sebesar Rp. 48.450.294,00 dengan rincian sebagai berikut.

a	Beban Barang Pakai Habis	Rp
.		
b	Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp
.		
c	Beban Barang Bekas Dipakai	Rp
.		
i.	Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp
	- Beban Barang Pakai Habis	Rp
	- Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp
	- Beban Barang Bekas Dipakai	Rp
Jumlah		Rp 48.450.294,00

8. Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2023 sebesar Rp. 25.366,00. dengan rincian sebagai berikut.

a	Utang Beban Telepon	Rp 25.366,00.
.		
b	Utang Beban Air	Rp
.		
c	Utang Beban Listrik	Rp
.		
d	Utang Beban Surat Kabar/ Majalah	Rp
.		
e	Utang Beban Faximili, Internet	Rp
.		
f.	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp
g	Utang Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp
.		
Jumlah		Rp 25.366,00.

9. Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 14.030.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a	Beban Barang Pakai Habis	Rp
.		
	- Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	Rp 14.030.000,00.
	- dst	Rp
b	Beban Barang Tak Habis Pakai	Rp
.		
	- Beban Komponen	Rp

- dst	Rp	
c Beban Barang Bekas Dipakai		Rp
- dst	Rp	
JUMLAH		Rp 14.030.000,00

10.Koreksi Lebih Catat pembebanan Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp 0,00 antara lain terdiri dari:

a Utang Beban Telepon		
.		
- Data Utang Beban Telepon awal	Rp	
- Pembayaran Utang Beban Telepon	Rp (.....)	
Lebih Catat Saldo Awal Beban Telepon		Rp
b Utang Beban Air		
.		
- Data Utang Beban Air Awal	Rp	
- Pembayaran Utang Beban Air	Rp (.....)	
Lebih Catat Saldo Awal Beban Air		Rp
JUMLAH		Rp 0,00

- 3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan saldo Beban Hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar NIHIL.
- 4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar NIHIL.
- 5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar NIHIL
- 6) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar NIHIL.
- 7) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2023, sedangkan belanja modal tahun 2023 telah dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2023.

Saldo beban penyusutan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.70.114.070 lebih kecil Rp 184.725.216,00 atau 13.63.% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 1.354.839.286 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 3.3 Rincian Beban Penyusutan

No.	Rincian Beban Penyusutan	Saldo (Tahun 2023)	Saldo (Tahun 2022)
1.	<i>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	<i>1.170.114.070,00</i>	<i>1.354.839.286</i>
	- Beban Penyusutan Alat Angkutan	101.295.427	48.640.428
	- Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	448.309.367	453.305.362
	- Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	116.767.487	75.779.086
	- Beban Penyusutan Komputer	475.426.518	744.725.864
	- Beban Penyusutan Rambu-Rambu	28.315.271,00	32.388.546
2.	<i>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	<i>9.198.549,00</i>	<i>7.883.705</i>
	- Beban Penyusutan Bangunan Gedung	9.198.549,00	7.883.705
Jumlah Total		1.179.312.619,00	1.362.722.991

- c. **Surplus/Defisit dari Operasi**
Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp (13.371.234.426,11) lebih kecil Rp (1.157.161.542,89) atau 7,96 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp (14.528.395.969,00).
- d. **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**
Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 sebesar NIHIL.
- e. **Surplus/Defisit - LO**
Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp (13.371.234.426,11) sedangkan saldo tahun 2022 sebesar Rp (14.528.395.969,00).

4. **Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Saldo Ekuitas Awal	4.379.436.178	4.071.072.510
2.	Surplus/defisit – LO	(13.371.234.426,11)	(14.528.395.969)
3.	Koreksi Ekuitas	(475.479.025)	91.038.213
4.	Ekuitas akhir	3.097.953.555	4.379.436.178

Koreksi Ekuitas sebesar Rp (475.479.025) dapat dijelaskan sebagai berikut.

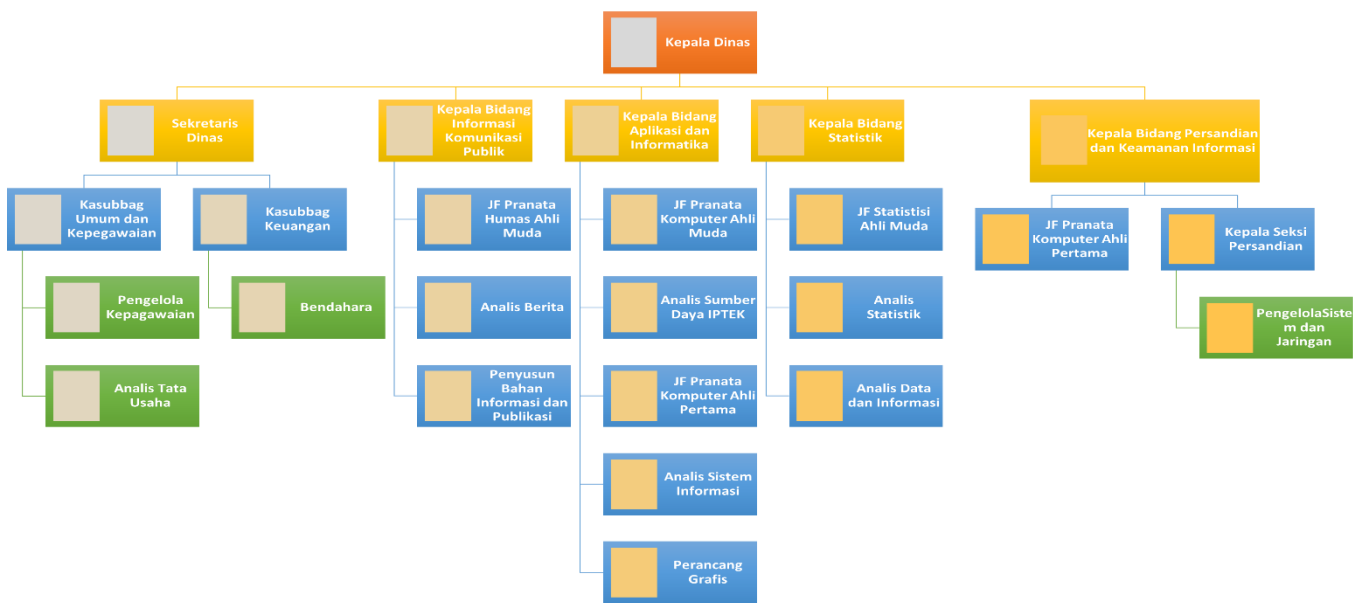
Koreksi Tambah Ekuitas : **91.038.213,00**

-	Kendaraan Dinas Bermotor	166.740.833,00	
	Perorangan		
-			
-			
-			+
	Total Koreksi Tambah		166.740.833,00
Koreksi Kurang Ekuitas :			
-	Personal Computer	(733.258.071,00)	
-		(.....)	
-		(.....)	
-		(.....)	+
	Total Koreksi Kurang		(733.258.071,00) +
	Total Koreksi Ekuitas		(475.479.025,00)

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

- 1. Penjelasan Umum
 - a. Informasi Umum Tentang Entitas

b. Struktur Organisasi



- 2. Informasi Lainnya

Selama tahun 2023 pada SKPD terjadi hal-hal penting yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan ini, sebagai berikut: *(Contoh)*

 1. Penggantian manajemen pemerintah selama tahun berjalan ;
 2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 3. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca;
 4. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan (SOTK Baru); dan
 5. Penjelasan tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD untuk Penanganan COVID-19
 - a. Pendahuluan

Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengalokasikan Belanja untuk Penanganan COVID-19 pada sub kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan tersebut menginstruksikan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemulihan di bidang ekonomi,

bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial. Untuk itu, perlu dijelaskan dalam Laporan Keuangan **SKPD** tentang realisasi APBD untuk penanganan *COVID-19*.

b. Penjelasan Realisasi APBD untuk Penanganan *COVID-19*

APBD untuk penanganan *COVID-19* yang telah diterima oleh **SKPD.....** sebesar **Rp.....** dengan rincian sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai salah satu bentuk Pertanggungjawaban keuangan atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Selain itu, sebagai wujud nyata dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah sebagai sebuah entitas akuntansi/pelaporan.

Blitar, 31 Desember 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda /IV d

NIP. 19650916 199112 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Pemeriksaan Kas dilampiri Fotocopy Rekening Koran per 31 Desember 2023
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan beserta Lampirannya
3. Daftar Inventarisasi Piutang Daerah per 31 Desember 2023
4. Daftar Inventarisasi Aset Perolehan per 31 Desember 2023 dilampiri KIB Perolehan tahun 2023 dari Simda BMD (Laporan Penatausahaan-KIB/KIR-Laporan KIB A/B/C/D-Pilih 2023)
5. Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023
6. Daftar Utang Beban yang Belum Dibayar s.d 31 Desember 2023
7. Daftar Beban Sewa Dibayar Dimuka s.d 31 Desember 2023
8. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka s.d 31 Desember 2023
9. Daftar Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga per 31 Desember 2023
10. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan s.d 31 Desember 2023
11. Daftar Hibah Barang (Aset) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Organisasi s.d 31 Desember 2023 □ di luar Penanganan Covid-19
12. Daftar Hibah Barang (Persediaan) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/Organisasi s.d 31 Desember 2023 □ di luar Penanganan Covid-19
13. Rincian Barang ke Neraca dan Rekapitulasi Barang ke Neraca dari Simda BMD (Laporan-Akuntansi-Rincian Barang ke Neraca)
14. Rekap Perhitungan Penyusutan per 31 Desember 2023 (dari Bidang Aset)
15. Berita Acara Rekonsiliasi LRA Semester II TA 2023 (antara PPK dengan Bidang Akuntansi)
16. Berita Acara Rekonsiliasi BMD Semester II TA 2023 (antara PPK dengan Bidang Akuntansi)